

ANALISIS NARATIF BERITA KONFLIK KPK DAN POLRI DI MEDIA INDONESIA *ONLINE*

*(Narrative Analysis concerning Conflict News between Corruption
Eradication Commission (KPK) and Indonesian National Police (Polri)
in Media Indonesia Online)*

Sri Wahyuni

Balai Bahasa Jawa Tengah
Jalan Elang Raya, Mangunharjo, Tembalang, Semarang,
Pos-el: yuni.bbjateng@yahoo.com

Diterima: 26 November 2018; Direvisi: 18 Desember; Disetujui: 19 Desember 2018

DOI : <http://dx.doi.org/10.26499/sawer.v24i2.489>

Abstract

Conflict between Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian National Police (Polri) has been going on for long time. Various mass media presented the relations between the two institutions with various perspectives. Media Indonesia online displays conflict news between the two institutions narratively. There are three important aspects in narrative analysis: story and plot, narrative structure, and character. The research uses descriptive qualitative method. This method is used to describe the data using the strategy and technique in narrative analysis. The result of the research shows that most of the news in Media Indonesia has a chronological plot, incomplete narrative structure, and characters that are displayed as helpers, princess, and criminals.

Keywords: *KPK; Polri; analysis; narrative; and Media Indonesia*

Abstrak

Konflik KPK dan Polri telah berlangsung lama. Berbagai media massa menampilkan hubungan kedua instansi itu dengan berbagai sudut pandang. *Media Indonesia online* menampilkan berita konflik kedua instansi itu secara naratif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori analisis naratif. Ada tiga aspek penting dalam analisis naratif, yaitu cerita dan alur cerita, struktur narasi, dan karakter. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data sesuai dengan teknik dan strategi dalam analisis naratif. Kesimpulan dalam penelitian ini, sebagian besar berita di *Media Indonesia* memiliki alur kronologis, struktur narasi tidak lengkap, dan karakter yang ditampilkan sebagai penolong, putri, dan penjahat.

Kata kunci: *KPK; Polri; analisis; naratif; dan Media Indonesia*

PENDAHULUAN

Sebagai bahasa media massa (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pasal 25 ayat 3*), bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting serta fundamental dalam menginformasikan semua berita pada masyarakat. Bagaimana bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan berita tergantung dari pembuat atau penulis berita. Hal itu juga

dipengaruhi oleh pandangan, tujuan, dan idealisme media tersebut.

Berita dalam surat kabar atau majalah tidak hanya tentang apa (*what*), siapa (*who*), di mana (*where*), kapan (*when*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Berita juga harus dikemas dalam bahasa yang menarik. Bahasa yang menarik akan mendongkrak oplah penjualan. Istilah *bad news is good news* muncul ketika berita buruk atau sedih yang menimpa

seseorang atau kelompok justru menjadi berita yang menarik untuk dijual.

Hal yang lebih menarik lagi, bahasa di media massa juga merepresentasikan kekuasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Wareing dalam Baryadi (2012: 23) menyebutkan bahwa representasi kekuasaan dalam unsur-unsur bahasa misalnya dapat ditemukan pada pandangan dominatif suatu kelompok terhadap kelompok lain yang direfleksikan ke dalam bahasa.

Bahasa yang menarik tidak lepas dari persoalan pilihan kata. Menurut Sasangka (2013: 97), pilihan kata atau diksi adalah pemakaian kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan suatu gagasan. Pilihan kata digunakan untuk membedakan nuansa makna secara jitu sehingga kata yang dipilih benar-benar dapat mengungkapkan gagasan secara tepat.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu berita yang menarik diteliti adalah permasalahan antara KPK dan Polri. Sesuai dengan pendapat Riyadi (2017: 3), hal pertama yang penting untuk menentukan topik penelitian ialah dasar ketertarikan. Dasar ketertarikan itu merupakan langkah awal untuk menentukan topik. Permasalahan di antara KPK dan Polri seakan tidak pernah berujung dengan pemicu yang datang silih berganti. Bahkan judul *Cicak vs Buaya* digunakan hingga berjilid-jilid. Permasalahan itu menjadi lebih rumit ketika media massa menampilkan berita tentang konflik tersebut dalam sudut pandang masing-masing. Setiap media massa menampilkan alur dan struktur narasi sesuai dengan ciri khas medianya. Namun, tidak semua media massa dalam menampilkan ciri khas medianya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ada media massa yang menggunakan narasi dengan alur dan kronologi yang melompat-lompat. Ada juga media massa yang menarasikan suatu tokoh dalam berita dengan karakter yang berlebihan. Biasanya hal itu dilakukan untuk menarik perhatian atau menggiring opini pembaca pada tujuan tertentu.

Dalam memahami informasi, potensi kegagalan bisa saja terjadi. Apalagi laju informasi sangat pesat di era milenial ini. Peristiwa yang baru saja terjadi di sebuah tempat dalam hitungan detik dapat segera diketahui oleh masyarakat luas. Dalam proses tersebut, berita dikatakan benar atau salah, fakta atau hoaks, nyaris tanpa seleksi dan hampir semua terpublikasikan. Risiko kegagalan informasi sangat besar terjadi. Baik itu berupa kesalahpahaman maupun terkena hasutan. Tentu saja masyarakatlah yang paling besar menerima risiko kegagalan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu terjadi, selain harus menjaga keaktualan dan kefaktualan berita, pekerja media massa perlu memperhatikan bahasa dalam menarasikan alur dan struktur berita.

Analisis naratif digunakan Ridwan dan Purnama (2015) pada artikel *Analisis Naratif Film Captain America: The First Avengers (Analisis Naratif dengan Teori Vladimir Propp)*. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan penggambaran tujuh fungsi karakter dalam film *Captain America* dan mengetahui karakter oposisi berlawanan dari karakter pahlawan dan penjahat yang ada di dalam film. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dalam tujuh fungsi karakter hanya ada enam fungsi karakter yang terdapat dalam film *Captain America*.

Analisis naratif juga digunakan Megawati (2014) pada penelitian *Analisis Naratif Berita "Hilangnya Pesawat Malaysia" pada Surat Kabar (SK) Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2014*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alur cerita, struktur narasi, dan karakter tokoh dalam berita "Hilangnya Pesawat Malaysia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cerita dan alur pada berita tersebut tidak disajikan secara kronologis. Alur runtut hanya terdapat pada awal dan akhir berita.

Analisis naratif banyak digunakan pada penelitian karya sastra. Namun, analisis naratif juga digunakan pada berita-berita di media massa. Salah satu topik yang menarik untuk dianalisis, yaitu perseteruan antara

KPK dan Polri. Ada beberapa fase yang dapat dikategorikan dalam mencermati berita permasalahan KPK vs Polri edisi Februari 2015. Fase pertama berisi berita-berita sebelum KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Fase kedua berisi berita-berita saat KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan ketegangan-ketegangan antara kedua instansi tersebut. Fase ketiga berisi berita-berita tentang perdamaian KPK dan Polri setelah Presiden Jokowi turun tangan mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menganalisis berita-berita yang memuat upaya perdamaian antara KPK dan Polri di *Media Indonesia online*.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bagaimana bahasa yang menunjukkan cerita dan alur narasi tentang berita KPK dan Polri edisi Februari 2015 di *Media Indonesia*? 2) bagaimana bahasa yang menunjukkan struktur narasi tentang berita KPK dan Polri pada Februari 2015 di *Media Indonesia*?, dan 3) bagaimana bahasa yang menunjukkan karakter pada berita KPK dan Polri edisi Februari 2015 di *Media Indonesia*?

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 1) mendeskripsikan penggunaan bahasa yang menunjukkan cerita dan alur narasi tentang KPK dan Polri edisi Februari 2015 di *Media Indonesia*; 2) mendeskripsikan penggunaan bahasa yang menunjukkan struktur narasi tentang berita konflik KPK dan Polri edisi Februari 2015 di *Media Indonesia*; dan 3) mendeskripsikan penggunaan bahasa yang menunjukkan karakter tentang tokoh-tokoh di KPK dan Polri edisi Februari 2015 di *Media Indonesia*.

KERANGKA TEORI

Kajian bahasa sudah seharusnya berangkat dari cara-cara pandang kritis agar kita dapat mengungkap sebenarnya dan nyata-nyatanya kecenderungan penggunaan bahasa atau wacana dalam masyarakat

kontemporer. Oleh karena itu, studi bahasa kritis sangat diperlukan kehadirannya (Santosa, 2012: 15). Namun, sebuah narasi, termasuk teks berita tidak akan pernah dapat benar-benar menginformasikan peristiwa dalam dunia nyata pada masyarakat seperti mereka mengalami atau melihat sendiri kejadian tersebut. Peristiwa yang berlangsung tahunan atau puluhan tahun kemungkinan hanya disajikan dalam beberapa lembar teks. Oleh karena itu dalam analisis naratif akan dilihat perbandingan antara waktu aktual dengan waktu ketika peristiwa disajikan dalam sebuah teks. Analisis naratif adalah analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah wacana narasi (Eriyanto, 2013: 24—25).

Secara singkat analisis naratif dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada tiga aspek penting untuk dilihat dalam analisis naratif, yaitu cerita dan alur cerita, struktur narasi, dan karakter. Aspek cerita dan alur cerita merupakan bagian penting dalam analisis naratif. Cerita adalah urutan kronologis suatu peristiwa yang kadang bisa ditampilkan dalam teks, kadang tidak, sedangkan alur adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Perbedaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu pertama, cerita adalah peristiwa yang utuh dari awal hingga akhir, sementara alur adalah peristiwa yang secara eksplisit ditampilkan dalam suatu teks. Kedua, cerita menampilkan peristiwa secara berurutan, kronologis dari awal hingga akhir, sedangkan alur adalah urutan peristiwa yang bisa dibolak balik (Eriyanto, 2013: 15—17).

Suatu narasi mempunyai struktur dari awal hingga akhir. Narasi dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya kekuatan jahat. Narasi diakhiri oleh upaya untuk menghentikan gangguan sehingga keseimbangan (ekuilibrium) tercipta kembali. Narasi diawali dari sebuah keteraturan, kondisi masyarakat yang tertib. Keteraturan tersebut kemudian berubah menjadi kekacauan akibat tindakan dari seorang tokoh. (Todorov dalam Eriyanto, 2013: 46)

Nick Lacey (dalam Eriyanto, 2013: 47—48) memodifikasi struktur narasi dari Todorov menjadi lima bagian yaitu.

- (1) Kondisi awal dan keteraturan
Narasi umumnya diawali dari situasi normal, ketertiban, dan keseimbangan. Dalam narasi tentang superhero, umumnya diawali oleh kondisi kota yang damai, kerajaan yang makmur, dan seterusnya.
- (2) Gangguan (*disruption*) terhadap keseimbangan
Bagian atau struktur kedua dari narasi adalah adanya gangguan (*disruption*). Hal itu bisa berupa tindakan atau adanya tokoh yang merusak keharmonisan, keseimbangan, atau keteraturan. Kehidupan yang normal dan tertib, setelah adanya tokoh atau tindakan tertentu berubah menjadi tidak teratur. Gangguan juga bisa berupa tindakan tertentu dari aktor yang bisa mengubah ketertiban.
- (3) Kesadaran terjadinya gangguan.
Gangguan (*disruption*) makin besar
Pada tahap ini, gangguan umumnya mencapai titik puncak (klimaks) karena gangguan (*disruption*) makin besar dan dampaknya makin dirasakan.
- (4) Upaya untuk memperbaiki gangguan
Pada tahap ini, narasi biasanya berisi tentang hadirnya sosok pahlawan (*hero*) yang berupaya memperbaiki kondisi. Di tahap ini, sudah ada upaya untuk menciptakan keteraturan kembali, meskipun upaya itu digambarkan mengalami kegagalan.
- (5) Pemulihan menuju keseimbangan, menciptakan keteraturan kembali.
Kekacauan yang muncul pada babak dua, berhasil diselesaikan sehingga keteraturan bisa dipulihkan kembali. Oleh karena itu, tahap ini merupakan babak terakhir dari suatu narasi.

Di dalam narasi terdapat karakter, yakni orang atau tokoh yang memiliki sifat atau perilaku tertentu. Karakter-karakter tersebut masing-masing mempunyai fungsi dalam narasi, sehingga narasi menjadi koheren (Eriyanto, 2013: 85).

Menurut Propp dalam Eriyanto (2013: 71—72), ada tujuh karakter dalam suatu narasi. Pertama, penjahat (*villain*), yaitu karakter adalah orang atau sosok yang membentuk komplikasi atau konflik dalam narasi. Kedua, penderma (donor). Karakter ini memberikan sesuatu kepada pahlawan, bisa berupa benda, informasi atau nasihat dimana pertolongan atau pemberian tersebut bisa membantu pahlawan dalam penyelesaian masalah pada narasi. Ketiga, penolong (*helper*), yaitu karakter yang membantu secara langsung pahlawan dalam mengalahkan penjahat dan mengembalikan situasi kepada situasi normal. Keempat, putri (*princess*) dan ayah (*father*). Karakter putri adalah orang yang mengalami perlakuan buruk secara langsung dari penjahat. Sementara karakter ayah adalah orang yang berduka atas nasib putri yang diperlakukan buruk oleh penjahat. Kelima, pengirim (*dispatcher*), yaitu karakter yang digambarkan sebagai orang yang mengirim pahlawan untuk menyelesaikan tugas dalam melawan penjahat. Pada umumnya, karakter ini ditampilkan seorang raja atau orang yang bijak. Keenam, pahlawan (*hero*), yaitu karakter yang mengembalikan situasi kacau akibat kehadiran penjahat menjadi normal. Ketujuh, pahlawan palsu (*false hero*). Antara karakter pahlawan dan penjahat, terdapat sosok "abu-abu", yakni pahlawan palsu. Pada awalnya, tokoh ini digambarkan baik dan membantu pahlawan, tetapi di akhir cerita terbongkar kedoknya bahwa ternyata dia seorang penjahat.

METODE

Sumber data dalam penelitian ini adalah situs www.mediaindonesia.com. Data dalam penelitian ini merupakan empat artikel di *Media Indonesia* yang diunggah selama Februari

2015. Artikel pertama dengan judul “KPK Minta Presiden Turun Tangan” diunggah pada Selasa, 3 Februari 2015; Kedua, artikel dengan judul “Istana Siapkan Perpu Selamatkan KPK” diunggah pada Kamis, 5 Februari 2015; Ketiga, artikel dengan judul “KPK Segerakan Koordinasi dengan Polri” diunggah pada Jum’at, 20 Februari 2015; dan keempat, artikel dengan judul “KPK akan Hentikan Kasus Budi” diunggah pada Sabtu, 28 Februari 2015. Semua data yang dipilih merupakan artikel yang menunjukkan upaya untuk memulihkan konflik antara KPK dan Polri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penyelesaian masalah dengan memaparkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampil sebagaimana adanya. Berdasarkan Sudaryanto (2015: 6—7), ada tiga tahapan strategis yang harus dilakukan peneliti dalam upaya memecahkan masalah, yaitu (1) penyediaan data, (2) penganalisisan data yang telah disediakan, dan (3) penyajian hasil analisis data.

Sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Arikunto, 2010: 22). Adapun, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode simak dengan teknik catat (Sudaryanto, 2015:133). Penulis menyimak dan memperhatikan semua berita yang memuat solusi kekisruhan KPK dan Polri. Selanjutnya, penulis mencatat data yang diperlukan dengan mengunduh data tersebut dari situs www.mediaindonesia.com.

Setelah terkumpul, data diklasifikasikan sesuai dengan cerita dan alur, struktur, dan karakter pada setiap narasi. Hasilnya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menguraikan hasil penelitian. Selanjutnya, simpulan dibuat berdasarkan analisis data pada setiap narasi

yang menunjukkan cerita dan alur, struktur, dan karakter.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kronologis yang disusun *bbc.com*, cerita (*story*) konflik KPK dan Polri pada tahun 2015 adalah berawal saat Presiden Joko Widodo memilih Budi Gunawan sebagai kandidat tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Keputusan Jokowi mengundang kritik karena keterkaitan Budi dengan kasus rekening gendut pejabat Polri serta pengaruh Megawati Sukarnoputri. Dua hari kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi padahal Budi Gunawan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Sejak penetapan sebagai tersangka itu, mulailah terjadi konflik antara KPK dan Polri. Beberapa konflik yang terjadi, yaitu: (1) Kuasa hukum Budi Gunawan melaporkan para komisioner KPK ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan tuduhan membocorkan rahasia negara berupa laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening Budi Gunawan dan keluarganya; (2) PLT Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan publik bahwa Abraham Samad pernah berambisi menjadi calon wakil presiden; (3) Bareskrim Polri menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kota Waringin Barat bersumpah palsu; (4) Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja diadukan ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber; (5) Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008.

(Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk diakses 13 Februari 2017)

Persetujuan antara KPK dan Polri mulai menurun pada pertengahan Februari 2015 ketika Presiden Joko Widodo turun tangan meredakan ketegangan tersebut. Pada fase inilah mulai terjadi kesepakatan di antara keduanya.

Edisi “KPK Minta Presiden Turun Tangan“

(1) Cerita dan Alur

Artikel ini menggunakan alur mundur sehingga tampak tidak kronologis. Paragraf pertama yang menunjukkan judul artikel sengaja ditampilkan untuk menarik perhatian pembaca. Padahal kalimat tersebut tidak harus ditampilkan pada awal artikel. Paragraf tersebut sebagai berikut.

- (1) *Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan keputusan soal pimpinan lembaga itu yang terjerat kasus pidana kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, jika semua pemimpin KPK menjadi tersangka, lembaga antirakyat itu terancam tak punya pimpinan.*

Paragraf pembuka dalam data (1) seharusnya dapat menggunakan data (2) yang terdapat pada paragraf keempat.

- (2) *Setelah Bambang Widjojanto dijadikan tersangka, Bareskrim Polri juga tengah meningkatkan status kasus yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad, dari penyelidikan ke penyidikan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan surat perintah dimulainya penyidikan atas kasus yang menyeret Abraham telah diterbitkan.*

Jika data 2 digunakan sebagai paragraf pembuka, cerita dan alur berita “KPK Minta Presiden Turun Tangan” menjadi lebih kronologis.

(2) Struktur Narasi

Struktur narasi berita “KPK Minta Presiden Turun Tangan” memiliki tiga unsur, yaitu gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya

memperbaiki gangguan. Berita diawali dengan upaya untuk memperbaiki gangguan yang terlihat pada kalimat pertama dalam paragraf awal. Upaya tersebut berupa penyerahan keputusan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan. Hal itu terlihat pada data 1 pada kalimat: *Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan keputusan soal pimpinan lembaga itu yang terjerat kasus pidana pada Presiden Joko Widodo.*

Unsur kesadaran terjadi gangguan terdapat pada data 1 pada kalimat berikut: *Pasalnya, jika semua pemimpin KPK menjadi tersangka, lembaga antirakyat itu terancam tak punya pimpinan.* Kalimat tersebut menunjukkan adanya kesadaran terjadi gangguan pada KPK yaitu, terancam tak punya pimpinan karena semua pimpinan KPK menjadi tersangka.

Unsur gangguan terhadap keseimbangan terdapat dalam data 2 pada kalimat *dijadikannya Bambang Widjojanto sebagai tersangka dan ditingkatkannya status kasus Ketua KPK Abraham Samad dari penyelidikan ke penyidikan.*

(3) Karakter Narasi

Tokoh pada narasi “KPK Minta Presiden Turun Tangan” menampilkan empat karakter, yaitu Deputy Pencegahan KPK Johan Budi SP, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, Presiden Joko Widodo, dan Abraham Samad. Dalam analisis karakter, Deputy Pencegahan KPK Johan Budi SP memiliki karakter penolong yang bertugas membantu pahlawan menyelesaikan tugasnya. Karakter penolong itu terlihat saat Johan Budi tidak membiarkan KPK berlarut-larut dalam masalah dan berinisiatif menyerahkan masalah itu pada Presiden. Hal itu juga terdapat pada data 1 pada kalimat: *Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan keputusan soal pimpinan lembaga itu yang terjerat kasus pidana kepada Presiden Joko Widodo.*

Presiden Joko Widodo dalam teks tersebut berfungsi sebagai pahlawan. Meskipun Presiden Joko Widodo tidak ditampilkan dalam

teks, karakternya berfungsi sebagai pahlawan. Presidenlah yang diharapkan menjadi penyelamat bagi KPK.

Karakter penjahat terdapat pada Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie. Sebagai representasi Polri, Irjen Ronny F Sompie mengatakan bahwa surat perintah penyidikan untuk Abraham Samad, pimpinan KPK telah terbit. Hal itu terlihat pada data (2) pada kalimat: *Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan surat perintah dimulainya penyidikan atas kasus yang menyeret Abraham telah diterbitkan.*

Berdasarkan kronologisnya, tindakan Polri menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka ditengarai merupakan bentuk upaya pelemahan KPK.

Karakter Abraham Samad ditampilkan sebagai putri karena dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi korban sehingga perlu mendapat pertolongan. Hal itu terlihat pada data berikut:

- (3) *Tak hanya soal pertemuan dengan elite PDIP, Abraham juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus pemalsuan dokumen, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pelapor, Feriyani Lim, melalui kuasa hukumnya, Haris Septiansyah, menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar Februari 2007 di Makassar ketika Lim mengurus paspor dengan hanya bermodal KTP dan KK tanpa perlu surat pindah dari Pontianak karena dibantu Abraham.*

Fungsi karakter sebagai putri yang perlu mendapat pertolongan pahlawan itu ditampilkan melalui ketidakberdayaan Abraham dalam menghadapi masalahnya

Edisi “Istana Siapkan Perppu Selamatkan KPK”

(1) Cerita dan Alur

Alur (plot) yang digunakan dalam artikel ini disusun secara kronologis. Berita tersebut diawali dengan pernyataan Menteri

Sekretaris Negara yang menyatakan Presiden belum menyiapkan Perppu. Pernyataan itu sangat kontras dengan judul artikel tersebut. Hal itu bertujuan untuk menarik perhatian dan emosi pembaca. Selanjutnya, emosi pembaca diturunkan dengan pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang menyatakan bahwa Presiden telah menyiapkan Perppu.

(2) Struktur Narasi

Struktur narasi dalam artikel ini memiliki tiga unsur, yaitu gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Unsur gangguan terhadap keseimbangan terdapat pada data berikut ini:

- (4) *MENTERI Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengarah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang penunjukan langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jika mayoritas pemimpin lembaga itu ditetapkan sebagai tersangka.*

Perkataan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, bertentangan dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Pratikno mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) sedangkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan sebaliknya. Hal itu menyebabkan perkataan Pratikno memenuhi unsur gangguan terhadap keseimbangan.

Unsur upaya untuk memperbaiki gangguan terdapat pada pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang terlihat pada data berikut ini:

- (5) *Namun, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan presiden telah menyiapkan perppu mengingat kondisi KPK saat ini, yakni empat pemimpinnnya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri.*

Kalimat tersebut menunjukkan unsur upaya memperbaiki gangguan yang dilakukan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto terhadap perkataan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Selain itu, pernyataan Andi Widjajanto bahwa *perppu tersebut, kata dia, bertujuan memastikan agar KPK tetap bisa menjalankan fungsinya* juga memiliki unsur upaya memperbaiki gangguan. Jika unsur tersebut tidak ada, tentu *perppu* tersebut tidak disiapkan.

Unsur kesadaran terjadinya gangguan terdapat pada data berikut ini.

- (6) *Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengaku prihatin dengan situasi yang dihadapi pimpinan KPK saat ini. Sebagai antisipasi, dia meminta Presiden Jokowi mengambil langkah cepat mengatasi permasalahan tersebut. "Jika keempatnya menyanggah status tersangka, KPK harus kita selamatkan. Presiden bisa menggunakan kewenangan yang dimilikinya mengeluarkan perppu yang mengisi kekosongan," kata Benny. Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, keluarnya perppu tersebut akan memudahkan DPR untuk membuat tim seleksi pimpinan KPK. "Bisa jalan bersama, Presiden keluarkan perppu dan kami (DPR) membentuk panitia seleksi KPK yang baru," tegasnya.*

Unsur kesadaran terjadinya gangguan dalam paragraf tersebut terdapat pada keprihatinan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman dengan situasi yang dihadapi pimpinan KPK, permintaan pada presiden mengeluarkan *perppu* untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan rencana pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK yang baru.

(3) Karakter

Tokoh dalam narasi "Istana Siapkan Perppu Selamatkan KPK" menampilkan empat

karakter, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Karakter penjahat dalam artikel ini diperlihatkan melalui tokoh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengeluarkan *perppu* tentang penunjukan langsung pimpinan KPK, padahal menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, presiden telah menyiapkan *perppu*. Hal itu menjadikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlihat bertentangan dengan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Adapun, tokoh Wakil Ketua DPR Fadli Zon memiliki karakter penjahat karena dia mengharapkan presiden untuk mempersiapkan *perppu* pembentukan panel pimpinan KPK. Hal itu terlihat pada data berikut:

- (7) *Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap presiden mengambil langkah-kecil untuk mempersiapkan perppu pembentukan panel pimpinan KPK.*

Selain itu, pernyataan-pernyataan Fadli Zon di berbagai media juga banyak memperlihatkan ketidaksetujuannya pada sepak terjang KPK. Dalam hal ini, reputasi Fadli Zon yang sangat terbuka mengkritik kebijakan Jokowi ikut berperan serta menjalankan fungsi karakter sebagai penjahat.

Karakter penolong diperlihatkan melalui tokoh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto yang mengklarifikasi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno tentang *perppu*. Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman juga memiliki fungsi sebagai penolong dalam teks tersebut. Karakter sebagai penolong ditunjukkan Benny Kabur Harman melalui upayanya dalam menyadari adanya gangguan dengan meminta *perppu* menyiapkan *perppu* dan merencanakan pembentukan panitia seleksi untuk memilih pimpinan KPK.

Edisi “KPK Segerakan Koordinasi dengan Polri”

(1) Cerita dan Alur

Alur dalam artikel ini disusun secara kronologis. Berita dimulai langsung pada pokok permasalahan. Selain untuk menghindari pemberitaan yang bertele-tele, hal itu juga digunakan untuk menarik perhatian pembaca.

(2) Struktur Narasi

Struktur narasi dalam artikel ini memiliki empat unsur, yaitu pemulihan menuju keseimbangan, gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan.

Pemulihan menuju keseimbangan terdapat pada kalimat berikut ini:

(8) *Presiden Joko Widodo resmi melantik Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas (Plt) pemimpin KPK.*

Pelantikan Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi Sapto Prabowo, dan Indriyanto Seno Adji sebagai pelaksana tugas (Plt) pemimpin KPK merupakan upaya pemulihan keseimbangan supaya KPK tetap dapat menjalankan fungsinya

Unsur gangguan terhadap keseimbangan terdapat pada kalimat berikut ini:

(9) *Oleh karenanya, ia belum mau membahas mengenai kriminalisasi 21 penyidik KPK.*

Frasa. *kriminalisasi 21 penyidik KPK* menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan

Unsur upaya untuk memperbaiki gangguan terdapat pada kalimat berikut ini:

(10) *Seusai pelantikan, Ruki yang didaulat mengisi posisi Abraham Samad mengatakan, akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI. Pun, menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain.*

(11) *Senada, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan KPK.*

Upaya memperbaiki gangguan terdapat pada poin-poin berikut ini: 1) akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI; 2) menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak yang lain; 3) pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan KPK.

Unsur kesadaran terjadinya gangguan terdapat pada data berikut;

(12) *Tanpa kordinasi semuanya tidak bisa dijalankan. Nanti sebentar lagi kita akan berbagi tugas, akan melakukan koordinasi dengan Kapolri. Tentu kalian berharap pada saya karena saya mantan polisi,” ujar Ruki di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2)*

Unsur kesadaran terjadinya gangguan ditunjukkan pada kalimat: *Tanpa koordinasi semuanya tidak bisa dijalankan.* Data tersebut menunjukkan adanya kesadaran terjadi gangguan bahwa tanpa koordinasi dari kedua belah pihak maka gangguan berupa kriminalisasi KPK akan terus berlanjut.

(3) Karakter

Tokoh dalam judul “KPK Segerakan Koordinasi dengan Polri” menampilkan satu karakter, yaitu penolong. Karakter penolong memiliki tugas membantu tugas seorang pahlawan. Dalam narasi “KPK Segerakan Koordinasi dengan Polri” tidak ada tokoh yang ditampilkan memiliki karakter sebagai penjahat. Tokoh-tokoh tersebut, yaitu Taufiequrachman Ruki, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja, dan Wakapolri Komjen, Badrodin Haiti.

Taufiequrachman Ruki menampilkan karakter sebagai penolong karena berusaha menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain. Hal itu terlihat pada data (10) pada kalimat: *Seusai pelantikan, Ruki yang didaulat mengisi posisi Abraham*

Samad mengatakan, akan segera melakukan koordinadi dengan pihak Kepolisian RI. Pun, menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum yang lain.

Selain data (10), karakter penolong Taufiequrachman Ruki juga terlihat pada data berikut:

- (13) *"Tanpa kordinasi semuanya tidak bisa dijalankan. Nanti sebentar lagi kita akan berbagi tugas, akan melakukan koordinasi dengan Kapolri. Tentu kalian berharap pada saya karena saya mantan polisi," ujar Ruki di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2).*

Pernyataan tersebut menunjukkan upaya-upaya positif yang dilakukan Taufiequrachman Ruki dalam memulihkan hubungan antara KPK dan Polri.

Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja menampilkan karakter sebagai penolong karena berusaha melakukan koordinasi secara intensif dengan KPK. Hal itu terlihat pada kalimat berikut ini: *Senada, Komisioner KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi secara intensif dengan KPK.* Selain menunjukkan unsur upaya memperbaiki gangguan, perkataan Adnan Pandu Praja tersebut juga menunjukkan upaya positif dalam mengatasi persoalan KPK dan Polri.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menampilkan karakter sebagai penolong karena berusaha melakukan pertemuan (komunikasi) dengan KPK. Hal itu terlihat pada kalimat berikut ini: *Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang juga selaku Plt Kapolri mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan KPK pada hari ini.* Perkataan Badrodin Haiti tersebut juga menunjukkan upaya positif sebagai penolong dalam memulihkan hubungan KPK dan Polri.

Edisi "KPK akan Hentikan Kasus Budi"

(1) Cerita dan Alur

Artikel ini memiliki alur yang disusun secara kronologis. Berita dimulai langsung pada

pokok permasalahan. Selain untuk menghindari pemberitaan yang bertele-tele, hal itu digunakan juga untuk menarik perhatian pembaca.

(2) Struktur Narasi

Struktur narasi pada "KPK akan Hentikan Kasus Budi" memiliki empat unsur, yaitu pemulihan terhadap keseimbangan, gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan.

Unsur pemulihan terhadap keseimbangan terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini:

- (14) *PELAKSANA Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengisyaratkan pihaknya tidak akan melanjutkan penyidikan perkara Komjen Budi Gunawan. Ia menegaskan KPK patuh pada hasil sidang praperadilan di PN Jaksel.*

Kalimat pertama tentang keputusan KPK tidak melanjutkan penyidikan perkara Komjen Budi Gunawan merupakan unsur pemulihan terhadap keseimbangan dalam struktur cerita. Hal itu ditegaskan pula oleh Johan Budi bahwa KPK patuh pada hasil sidang praperadilan.

Unsur gangguan terhadap keseimbangan terdapat pada kalimat-kalimat berikut ini: *Kesimpulannya kasus ini tidak sah demi hukum. Penetapan status tersangka tidak sah. Surat perintah penyidikan juga tidak sah. Lalu penyidikan yang dilakukan, pun tidak sah."*

Gangguan terhadap keseimbangan dalam struktur cerita itu disebutkan secara berturut-turut, yaitu kasus tersebut tidak sah demi hukum, penetapan status tersangka tidak sah, surat perintah penyidikan juga tidak sah, dan penyidikan yang dilakukan pun tidak sah.

Adapun, unsur upaya untuk memperbaiki gangguan terdapat pada data berikut ini:

- (15) *Ketika ditanya apakah itu berarti KPK tidak akan melanjutkan penanganan kasus Budi Gunawan, ia menyatakan pihaknya menghormati putusan praperadilan.*

- (16) *Sesuai bersama empat pemimpin lain KPK bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, kemarin pagi, Johan menjelaskan KPK akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung hari ini atau besok. "Kami akan membicarakan solusi, jalan keluar, dan tentu harus tetap berada pada norma-norma hukum. Bukan di luar norma-norma hukum."*

Pernyataan Johan Budi yang merepresentasikan sikap KPK bahwa KPK menghormati putusan praperadilan menunjukkan upaya untuk memperbaiki gangguan. Selain itu, KPK juga akan berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung membicarakan solusi dan jalan keluar masalah tersebut. Hal itu juga menunjukkan upaya KPK memperbaiki gangguan.

Unsur kesadaran terjadinya gangguan terdapat pada paragraf berikut:

- (17) *"Sesuai putusan praperadilan, KPK tidak berwenang menangani kasus BG. Kami harus menghormati putusan pengadilan," ujarnya di Gedung KPK, kemarin.*

KPK, imbuhnya, akan mencari jalan keluar karena di satu sisi praperadilan memutuskan mereka tak berwenang menangani kasus itu, tetapi di sisi lain tak boleh menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Upaya kasasi kan sudah dilakukan, tapi ditolak. Kami masih memikirkan jalan keluarnya, tetapi belum ada opsi untuk melimpahkan kasus ini ke kepolisian atau kejaksaan."

Kesadaran terjadi gangguan terdapat pada klausa *KPK tidak berwenang menangani kasus BG*. Kedua, unsur tersebut juga terdapat pada *praperadilan memutuskan mereka tak berwenang menangani kasus itu, tetapi di sisi lain tak boleh menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3)*. Klausa tersebut

menunjukkan adanya kesadaran terjadi gangguan mencapai titik puncak (klimaks) dan dampaknya makin dirasakan.

(3) Karakter

Tokoh dalam judul "KPK akan Hentikan Kasus Budi" menampilkan dua karakter, yaitu putri dan penjahat. Tokoh putri ditampilkan melalui karakter-karakter yang merepresentasikan KPK. Tokoh-tokoh tersebut, yaitu Plt. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, dan Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Adapun, tokoh penjahat ditampilkan melalui karakter Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Irjen Moechgiarto.

Selain data (15) dan (17), karakter Johan Budi sebagai putri juga terlihat pada data berikut.

- (18) *Johan mengatakan, sampai saat ini KPK belum punya rencana untuk menempuh jalur hukum luar biasa lewat peninjauan kembali.*

Data tersebut menunjukkan tokoh putri yang ditampilkan melalui karakter KPK dan direpresentasikan oleh Johan Budi. Tokoh putri digambarkan sebagai karakter yang berada dalam posisi sulit dan mendapatkan perlakuan buruk dari penjahat. Dia memerlukan pembelaan dari tokoh pahlawan. Masalah-masalah yang dihadapi KPK menjadikan instansi tersebut sebagai tokoh yang teraniaya.

Karakter Indriyanto Seno Adji sebagai putri terlihat pada kalimat berikut ini.

- (19) *Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menjamin pertemuan dengan Polri dan Kejagung nanti bukan untuk tukar-menukar kasus atau kongkalikong penyelesaian perkara. "Yang penting mengembalikan komunikasi di antara penegak hukum yang sempat terganggu," tukasnya.*

Pada saat itu, tokoh putri (KPK) melalui representasi Indriyanto Seno Adji telah mulai

diselamatkan. Dengan demikian, kesepakatan mulai terjalin dan ketegangan antara penjahat dan putri mulai mereda. Sementara itu, tokoh putri (KPK) yang direpresentasikan Taufiequrachman Ruki juga terlihat pada data berikut.

(20) Menurut Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, pertemuan ketiga lembaga hukum itu diperlukan terkait dengan keengganan Presiden Jokowi masuk ranah proses hukum. “Beliau tidak mau mengintervensi.”

Pada kalimat tersebut terlihat bahwa antara putri dan penjahat harus mengikuti instruksi tokoh pahlawan (Presiden Jokowi) dengan mengadakan pertemuan. Adapun, tokoh penjahat terdapat pada representasi dari Polri, yaitu Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Irjen Moechgiarto. Tokoh itu dianggap sebagai penjahat karena dia menyatakan tentang kesimpulan kasus dugaan korupsi pada calon Kapolri Budi Gunawan tidak sah. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa surat perintah penyidikan terhadap Budi Gunawan tidak sah, sehingga penyidikan yang dilakukan pun tidak sah. Hal itu terdapat pada data berikut:

(21) Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Irjen Moechgiarto mengatakan Polri sudah menerima putusan sidang praperadilan Budi Gunawan. “Kesimpulannya kasus ini tidak sah demi hukum. Penetapan status tersangka tidak sah. Surat perintah penyidikan juga tidak sah. Lalu penyidikan yang dilakukan, pun tidak sah.” (Cah/Kim/Beo/X-9)

PENUTUP

Cerita dan alur kasus KPK dan Polri edisi Kasus Budi Gunawan di *Media Indonesia*, sebagian besar disajikan secara kronologis. Sebagian besar ditampilkan dengan diawali langsung pada pokok persoalan.

Sebagian besar struktur narasi ditampilkan kurang lengkap. Struktur narasi yang lengkap seharusnya memuat kondisi awal dan keteraturan, gangguan (*disruption*) terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, upaya untuk memperbaiki gangguan, dan pemulihan menuju keseimbangan. Namun, struktur narasi di *Media Indonesia* sebagian besar hanya memuat tiga struktur narasi yang terdiri atas; gangguan (*disruption*) terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Hanya ada satu artikel yang memuat empat struktur narasi yang terdiri atas; gangguan (*disruption*) terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, upaya untuk memperbaiki gangguan, dan pemulihan menuju keseimbangan. Dalam menyampaikan informasi, sebaiknya struktur narasi disajikan secara lengkap. Hal itu berguna untuk menghindari keambiguan dan kesalahan dalam memahami informasi.

Tokoh dalam artikel di *Media Indonesia* sebagian besar memiliki karakter penolong, putri, dan penjahat. Tokoh pahlawan (Presiden Joko Widodo) hanya ditampilkan berdasarkan penceritaan orang. Karakter penolong ditampilkan melalui tokoh-tokoh dalam jajaran pemerintahan, sedangkan karakter penjahat ditampilkan antara lain melalui tokoh dari Polri. Karakter putri sebagai tokoh yang termarginal ditampilkan melalui tokoh-tokoh yang merepresentasikan KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baryadi, Praptomo. (2012), *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta: Penerbit Sanata Dharma.
- Eriyanto. (2013), *Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya dalam Analisis Teks Berita Media*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Megawati. (2014) Analisis Naratif Berita "Hilangnya Pesawat Malaysia" pada Surat Kabar (SK) Kedaulatan Rakyat Edisi Maret 2014, *Skripsi* Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, <http://eprints.uny.ac.id/18640/1/Megawati%2007201244038.pdf> (diakses pada 12 April 2017).
- Rifwan, Ibrahim dan Purnama, Hadi. (2015) Analisis Naratif Film Captain America: The First Avengers (Analisis Naratif dengan Teori Vladimir Propp) dalam Jurnal eproc, https://www.google.co.id/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC5MekxO3YAhXMybwKHUINDBwQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fopenlibrary.elkomuniversity.c.id%2Fpustaka%2Ffiles%2F99975%2Fjurnal_eproc%2Fanalisis-naratif-film-captain-america-the-first-avenger-analisis-naratif-dengan-teori-vladimir-propp.pdf&usq=AOvVaw0lren04gOXTJFeqQoR_Zzc (diakses 7 Desember 2017).
- Santosa, Riyadi (2017), *Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan*, Surakarta: UNS Press.
- Santosa, Anang. (2012), *Studi Bahasa Kritis: Mengungkap Bahasa Membongkar Kuasa*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sasangka, Sry Satriya Tjatur Wisnu. (2013), *Gapura Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Elmatara.
- Sudaryanto. (2015), *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- www.bbc.com. (2017) "Kronologis Kasus Budi Gunawan dan Ketegangan KPK-Polri", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk (diakses pada 13 Februari 2017).

How To Cite: Wahyuni, S. (2018). ANALISIS NARATIF BERITA KONFLIK KPK DAN POLRI DI MEDIA INDONESIA ONLINE (Narrative Analysis concerning Conflict News between Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian National Police (Polri) in Media Indonesia Online). SAWERIGADING, 24(2), 143—155. doi:<http://dx.doi.org/10.26499/sawer.v24i2.489>